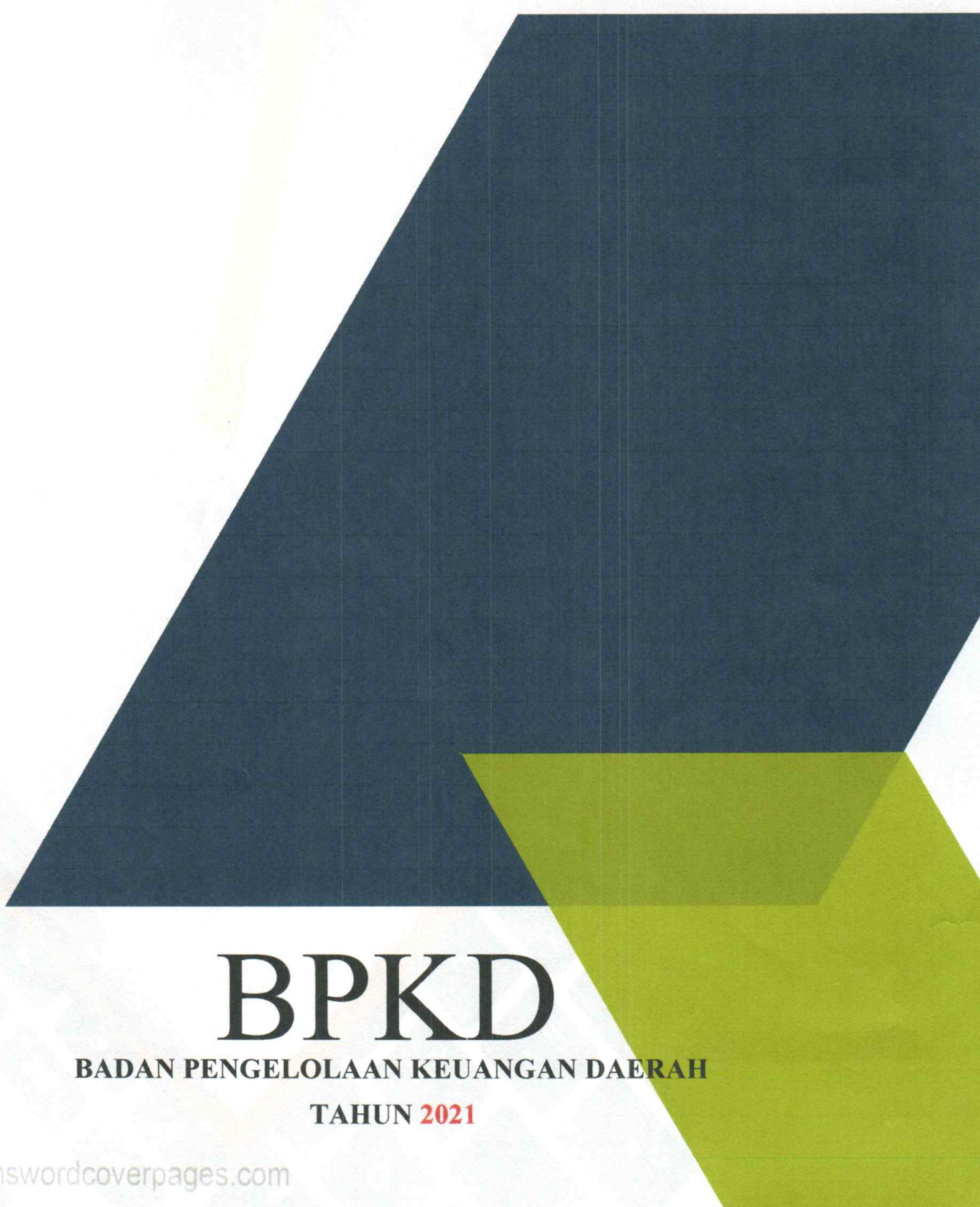


Rencana Kerja Tahunan 2021



BPKD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2021 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2021 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan yaitu sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan dan pedoman serta alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasaran. Sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun pada tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 sehingga ada beberapa perubahan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun. Salah satu bentuk perubahan adalah perubahan nomenklatur kegiatan menjadi sub kegiatan, sehingga nomenklatur lama disesuaikan dengan aturan yang baru namun tidak merubah terhadap target kinerja dan rencana yang sudah ditetapkan pada Renstra BPKD Tahun 2016-2021.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 1 September 2020



Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641116 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN BPKD KABUPATEN	
 PANGANDARAN TAHUN 2020.....	8
2.1 Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKD.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	15
BAB III PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah (SKPD) dan Indikator Kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Target Kinerja Tahunan di dalam Rencana Kinerja ditetapkan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unsur penunjang terhadap pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2), Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBDP);
- b. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi tugas Bidang Pendapatan, Perencanaan dan Anggaran Belanja serta Kekayaan.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Badan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Dari analisis permasalahan, hambatan dan faktor pendorong terhadap pelayanan SKPD, maka dapat diinventarisir beberapa isu-isu strategis yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan SKPD dalam lima tahun ke depan. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, melalui implementasi deapan agenda perubahan reformasi birokrasi;
- 2) Belum optimalnya tata kelola Keuangan pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah;
- 3) Masih rendahnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD;
- 4) Optimalisasi pengelolaan Badan-badan Usaha Daerah sebagai sumber penghasilan penerimaan pendapatan daerah;
- 5) Optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai penghasil penerima pendapat daerah;
- 6) Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah;
- 7) Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pendapatan daerah dalam rangka efektifitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8) Intruksi Presiden terkait dengan upaya Membendung Covid 19

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah :

1. Menyusun RKT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021; dan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1).

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, memuat beberapa point diantaranya :

Tabel II.1
Evaluasi Kinerja BPKD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	LHE SAKIP	B	A*	127	
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP	100	
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP	100	
4	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)	%	15	3,32%	-27,79%	

*Nilai SAKIP sampai dengan triwulan II 2019



Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

Tabel II.2
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKD
Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	87	90,53	967.313.400,00	875.749.486,00	90,53
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	Lembar	500	234	100,00	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Rekening	7	4	87,67	425.950.000,00	373.436.253,00	87,67
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	Unit	60	37	51,63	25.390.000,00	13.109.600,00	51,63
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah SDM Non PNS dalam kegiatan teknis perkantoran tiap bulan	Orang	1	1	100,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Orang	3	4	97,40	98.678.000,00	96.117.013,00	97,40
1.6	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	Orang	3	3	99,92	52.200.000,00	52.158.000,00	99,92
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang dibeli	Jenis	95	84	99,74	149.979.400,00	149.589.220,00	99,74
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	Jenis	7	3	70,96	28.400.000,00	20.152.800,00	70,96
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Jenis	6	4	99,17	3.935.000,00	3.902.500,00	99,17
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	jenis	5	5	100,00	4.675.000,00	4.675.000,00	100,00
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman yang dibeli	Jenis	2	2	79,04	67.276.000,00	53.176.500,00	79,04



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Kali	250	79	98,00	70.000.000,00	68.602.600,00	98,00
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	Jumlah SDM Pengemudi setiap bulan	Orang	1	1	100,00	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	%	25,74	4,84	18,80	761.069.000,00	696.635.478,00	91,53
		Cakupan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	%	27,48	14,06	51,16			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	7	6	99,25	15.000.000,00	14.887.00,00	99,25
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	unit	120	133	93,21	182.669.000,00	170.274.578,00	93,21
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	8	6	75,62	208.500.000,00	157.660.000,00	75,62
2.4	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer yang dibeli	Unit	17	17	99,96	199.900.000,00	199.813.900,00	99,96
2.5	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang tersedia	Unit	3	3	99,35	155.000.000,00	154.000.000,00	99,35
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	0	0	0	0	0	0
5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	0	0	0	0	0	0
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	47,11	98,93	432.015.000,00	427.372.500,00	98,93
6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Dokumen	8	8	83,21	2.215.000,00	1.843.000,00	83,21
6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	61,54	325.000,00	200.000,00	61,54
6.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	99,04	1.970.000,00	1.951.000,00	99,04
6.4	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen dan SDM NON PNS dalam perencanaan program dan kegiatan	Dokumen dan Orang	7	15	98,66	28.020.000,00	27.644.000,00	98,66



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
6.5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SDM Non PNS pengelolaan keuangan tiap bulan	Orang	1	1	98,86	223.225.000,00	220.671.000,00	98,86
6.6	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SDM Non PNS pengelolaan barang daerah tiap bulan	Orang	1	1	99,10	122.265.000,00	121.163.000,00	99,10
6.7	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah SDM Non PNS pengelolaan pendapatan daerah tiap bulan	Orang	1	1	99,61	18.625.000,00	18.551.500,00	99,61
6.8	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Non PNS pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian tiap bulan	Orang	2	0	99,94	35.370.000,00	35.349.000,00	99,94
18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran Daerah	cakupan ketersediaan dokumen penganggaran	%	100	65,9	95,25	6.506.927.000,00	6.197.987.800,00	95,25
18.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Raperda Tentang APBD yang disusun	Raperda	1	1	99,57	713.200.000,00	710.127.800,00	99,57
18.2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbup Penjabaran APBD yang disusun	Raperbup	1	1	97,77	641.450.000,00	627.167.300,00	97,77
18.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda Tentang Perubahan APBD yang disusun	Raperda	1	1	99,80	716.200.000,00	714.780.200,00	99,80
18.4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Raperbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	Raperbup	7	12	99,99	1.263.500.000,00	1.263.434.950,00	99,99
18.5	Asistensi RKA-DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	Kali	35	35	99,92	1.037.627.000,00	1.036.801.200,00	99,92
18.6	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pengelola keuangan desa yang meningkat pemahamannya mengenai pengelolaan keuangan desa	Desa	93	93	99,02	221.850.000,00	219.673.000,00	99,02
18.7	Pemeliharaan dan Update Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SKPD yang Terupdate dengan sistem	SKPD	35	35	86,65	164.500.000,00	142.547.350,00	86,65
18.8	Sinergitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah SKPD yang memahami Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah	SKPD	35	35	96,09	399.600.000,00	383.975.200,00	96,09
18.9	Penyusunan KUA-PPAS Murni	Jumlah Dokumen KUA,PPAS	Dokumen	1	2	66,86	658.500.000,00	440.306.000,00	66,86
18.10	Penyusunan KUA-PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUPA,PPASP	Dokumen	1	2	99,80	660.500.000,00	659.174.800,00	99,80
18.11	Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	1	0	0	30.000.000,00	0	0



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
19	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	cakupan penatausahaan keuangan daerah	%	83,33	41,83	93,87	4.957.989.329,00	4.654.232.570,00	93,87
19.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Raperda	1	1	95,48	349.000.000,00	333.212.000,00	95,48
19.2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Raperbup	1	1	100,00	320.800.000,00	320.800.000,00	100,00
19.3	Penatausahaan Belanja Pegawai	Jumlah SKPD yang Dikelola	SKPD	35	0	90,37	44.750.000,00	40.438.500,00	90,37
19.4	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	Dokumen	1	1	96,43	336.000.000,00	324.000.000,00	96,43
19.5	Penatausahaan SP2D SKPD/SKPKD	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	SPD	4600	3859	75,40	122.400.000,00	92.290.500,00	75,40
19.6	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun	Dokumen	1	1	99,97	659.000.000,00	658.811.900,00	99,97
19.7	Penyelenggaraan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD Yang melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	SKPD	35	35	59,82	50.319.329,00	30.100.000,00	59,82
19.8	Penyelenggaraan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	SKPD	9	9	3,86	35.000.000,00	1.350.000,00	3,86
19.9	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan PPKD	Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah Bansos, Bankeu	Dokumen	8	8	85,09	325.000.000,00	276.553.000,00	85,09
19.10	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan BUD	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	12	12	78,80	489.000.000,00	385.356.000,00	78,80
19.11	Pelaksanaan Rekonsiliasi Tugas Pembantuan, Bantuan Keuangan dan DAK	Jumlah Tahapan Pengajuan	Kali	3	3	87,22	15.000.000,00	13.083.300,00	87,22
19.12	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi yang diupdate	Aplikasi	1	0	98,60	2.000.120.000,00	1.972.121.670,00	98,60
19.13	Pengelolaan Dana Perimbangan	Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	SKPD	35	0	0	0	0	0
19.14	Penatausahaan Kas Umum Daerah	Jumlah Laporan Kas Umum Daerah yang Disusun	Dokumen	12	12	98,53	35.000.000,00	34.486.200,00	98,53



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
19.15	Penatausahaan DBH Pajak Provinsi dan Penerimaan Dana Transfer	Jumlah Laporan/LKT yang Disusun	Laporan	4	4	98,59	40.000.000,00	39.435.500,00	98,59
19.16	Penatausahaan Belanja Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hibah Bansos yang Disusun	Laporan	12	12	99,74	74.600.000,00	74.406.000,00	99,74
19.17	Penatausahaan Belanja Langsung	Jumlah waktu Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Langsung	SKPD	35	35	93,21	62.000.000,00	57.788.000,00	93,21
20	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan aset yang tercatat	%	100	31,95	80,92	21.729.602.500,00	17.584.147.545,00	80,92
20.1	Pendataan/Inventarisasi Barang Kekayaan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	Dokumen	1	1	88,44	250.000.000,00	221.102.527,00	88,44
20.2	Penghapusan Barang-Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penghapusan	Kali	3	1	53,31	55.000.000,00	29.321.000,00	53,31
20.3	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di Update	Aplikasi	1	1	96,74	125.000.000,00	120.920.000,00	96,74
20.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah yang disertifikatkan	Bidang Tanah	10	33	96,48	441.000.000,00	425.466.780,00	96,48
20.5	Penyelenggaraan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD	Laporan	37	36	92,75	109.700.000,00	101.748.250,00	92,75
20.6	Penyelesaian Aset	Jumlah Aset yang diselesaikan	Laporan	1	1	96,82	52.500.000,00	50.829.000,00	96,82
20.7	Mutasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang Beralih kepemilikan dari ciamis ke kab/upaten Pangandaran	unit	70	20	100,00	57.087.500,00	57.087.500,00	100,00
20.8	Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum untuk Pembangunan Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	Jumlah Bidang Tanah yang tersedia bagi kepentingan umum untuk pembangunan fasilitas pemerintahan kabupaten pangandaran	Bidang Tanah	4	4	66,92	10.185.000.000,00	6.815.517.538,00	66,92
20.9	Penyediaan Lahan (Tanah PT KAI)	Jumlah lahan (Tanah PT.KAI) Tersedia	Lokasi	1	1	89,26	1.184.510.000,00	1.057.345.824,00	89,26
20.10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	271	257	93,60	8.064.600.000,00	7.548.678.000,00	93,60
20.11	Majelis TPTGR	Jumlah Kasus TPTGR yang ditangani	Kasus	2	1	20,99	55.205.000,00	11.590.000,00	20,99
20.12	Pengadaan Perlengkapan Bank Daerah (PMI)	Jumlah Perlengkapan Bank Darah yang Diadakan	Paket	1	1	99,53	1.150.000.000,00	1.144.541.126,00	99,53
21	Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Persentase peningkatan ketetapan pajak daerah lainnya pertahun	%	10	0	87,47	1.764.045.000,00	1.542.995.422,00	87,47



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
21.1	Pengembangan Sistem Informasi PBB P2	Jumlah Aplikasi Yang di Update	Aplikasi	1	1	89,57	23.000.000,00	20.600.000,00	89,57
21.2	Pemeliharaan Pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Subyek Pajak PBB P2	Jumlah Data Obyek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2	Objek Pajak	18.666	19378	96,12	219.575.000,00	211.063.609,00	96,12
21.3	Monitoring Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	Objek Pajak	400	500	92,02	145.220.000,00	133.637.000,00	92,02
21.4	Penilaian Objek dan Subjek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Ternilai	Objek Pajak	25	25	100,00	1.525.000,00	1.525.000,00	100,00
21.5	Cetak Masal dan Pendistribusian SPPT PBB	Jumlah SPPT yang didistribusikan	SPPT	463.000	463000	97,79	175.875.000,00	171.982.000,00	97,79
21.6	Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	4000	5700	88,66	221.115.000,00	196.046.000,00	88,66
21.7	Pengelolaan Sistem Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	Aplikasi	3	11	92,51	266.535.000,00	246.565.698,00	92,51
21.8	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Aplikasi Yang di Update	Aplikasi	1	1	53,33	126.200.000,00	67.305.495,00	53,33
21.9	Kajian Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pendapatan Asli Daerah	Dokumen	3	3	84,49	585.000.000,00	494.270.620,00	84,49
21.10	Peningkatan Kapasitas SDM Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kapasitas SDM Pendapatan Daerah	Orang	250	0	0	0	0	0
21.11	Penyusunan Perda Pengelolaan Sarang Burung Walet	Jumlah Perda Pengelolaan Sarang Burung Walet yang Dihasilkan	Dokumen	1	0	0	0	0	0
22	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan daerah lainnya pertahun	%	10	0	97,62	679.249.500,00	663.096.089,00	97,62
22.1	Pengelolaan BPHTB	Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan	Dokumen	567	893	87,25	67.150.000,00	58.590.839,00	87,25
22.2	Pemeriksaan Lapangan Atas Pembetulan, Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak	Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak	Dokumen	394	1541	87,93	48.400.000,00	42.558.500,00	87,93
22.3	Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB P2	Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB P2	Laporan	0	0	0	0	0	0
22.4	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Hasil Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	7000	7368	101,80	533.300.000,00	542.874.250,00	101,80
22.5	Penertiban Reklame	Jumlah reklame yang tertibkan	Reklame	0	0	0	0	0	0



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA					KEUANGAN		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
22.6	Lomba Sadar Pajak Tingkat Kecamatan dan Desa	Jumlah Desa yang lunas dalam Pembayaran Pajak PBB-P2 dalam masa pajak	Desa	0	0	0	0	0	0
22.7	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa	Wajib Pajak	60	60	62,74	30.399.500,00	19.072.500,00	62,74

Sumber : (*) Inspektorat Kab. Pangandaran
(**) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(***) Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kab. Pangandaran

*Realisasi SAKIP 2019
*Realisasi LHP BPK 2019
*Realisasi pajak unaudited 2020

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021

Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana pada Tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3
Sasaran dan Indikator Target Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	LHE SAKIP	BB	
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	
4	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)	%	15	



Adapun Rencana Kinerja tingkat Program dan Kegiatan untuk Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel II.4 dibawah ini :

Tabel II.4
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN	Ket.
		Indikator	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.072.092.478	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				103.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan SDM NON PNS dalam perencanaan program dan kegiatan	7	Dokumen dan Orang	63.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	8	Dokumen	40.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.202.500.000	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji ASN yang terbayarkan	100	%	15.000.000.000	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SDM Non PNS pengelolaan keuangan tiap bulan	1	Orang	53.700.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen	140.000.000	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	1	Dokumen	8.800.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				57.000.000	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah SDM Non PNS pengelolaan barang daerah tiap bulan	1	orang	57.000.000	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				65.000.000	
1.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah SDM Non PNS Pengelolaan pendapatan daerah tiap bulan	2	orang	65.000.000	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200.659.200	
1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian yang Tersedia	155 155	Stel Stel	140.659.200	
1.5.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah SDM Non PNS Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2	orang	60.000.000	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.189.664.204	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	6	Jenis	37.500.000	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN	Ket.
		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
					(Rp.)	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang dibeli Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	95 35 35	Jenis Jenis Jenis	747.064.160	
1.6.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	10	Jenis	77.100.044	
1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	6	Jenis	22.000.000	
1.6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	250	Kali	306.000.000	
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				847.743.074	
1.7.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	30	Jenis	277.743.074	
1.7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang dibeli	17	Unit	370.000.000	
1.7.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang tersedia	3	unit	200.000.000	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				865.230.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	500	Lembar	8.800.000	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	7	Rekening	447.000.000	
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis makanan dan minuman yang dibeli Jumlah SDM Keamanan setiap bulan Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan Jumlah SDM Non PNS dalam kegiatan teknis perkantoran tiap bulan Jumlah SDM Pengemudi setiap bulan	3 4 4 1 1	Jenis Orang Orang Orang Orang	409.430.000	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				541.296.000	
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	60 60	Unit Unit	215.000.000	
1.9.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	10	Jenis	21.296.000	
1.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	Jenis	155.000.000	
1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	7 6	Unit Orang	150.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				312.236.999.000	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN	Ket.
		Indikator	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				8.960.000.000	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA, PPAS	2	Dokumen	550.000.000	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA, PPASP	2	Dokumen	550.000.000	
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	35	SKPD	400.000.000	
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	35	SKPD	400.000.000	
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di asistensi	35	SKPD	400.000.000	
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi	35	SKPD	550.000.000	
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Raperda dan Perda Tentang APBD yang disusun	2 2	Raperbup, Perbup Raperda, Perda	1.700.000.000	
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperbup dan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun	2 2	Raperbup, Perbup Raperda, Perda	1.800.000.000	
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah SKPD yang memahami Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah	35	SKPD	1.150.000.000	
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Dokumen	700.000.000	
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah pengelola keuangan desa yang meningkat pemahamannya mengenai pengelolaan keuangan desa	186	Desa	550.000.000	
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah SKPD yang Terupdate dengan sistem	35	SKPD	210.000.000	
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				2.369.936.000	
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun Jumlah Laporan Kas Umum Daerah Yang Disusun	12 12	Dokumen Dokumen	985.000.000	
2.2.2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SKPD yang Dikelola jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	35 35	SKPD SKPD	344.936.000	
2.2.3	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah Bansos, Bankeu Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	8 35	Dokumen SKPD	535.000.000	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN Anggaran (Rp.)	Ket.
		Indikator	Target	Satuan		
	Transfer Lainnya					
2.2.4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah sistem Transaksi Non Tunai	1	Sistem	280.000.000	
2.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	4700	SP2D	225.000.000	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				3.702.143.000	
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	9	SKPD	250.000.000	
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	35	skpd	270.000.000	
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	1	Dokumen	449.126.000	
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun	1	Dokumen	980.000.000	
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/LKT yang Disusun Jumlah Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	4 1 1	Laporan Raperbup Raperda	1.183.017.000	
2.3.6	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan pengelola keuangan daerah Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	85 85	Orang Orang	570.000.000	
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				295.000.000.000	
2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan hibah bansos yang disusun jumlah tahapan pengajuan	12 3	laporan kali	250.000.000.000	
2.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyediaan Dana Darurat	1	Tahun	5.000.000.000	
2.4.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah laporan/RKT yang disusun	4	laporan	40.000.000.000	
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				2.204.920.000	
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hibah Bansos yang Disusun Jumlah Tahapan Pengajuan	12 3	Laporan Kali	204.920.000	
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi yang diupdate	1	Aplikasi	2.000.000.000	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				62.010.169.783	
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah				62.010.169.783	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN Anggaran (Rp.)	Ket.
		Indikator	Target	Satuan		
3.1.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang tersedia Bagi Kepentingan Umum untuk pembangunan Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 235	Bidang Tanah Unit	57.317.232.083	
3.1.2	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penghapusan	3	Kali	120.000.000	
3.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang diselesaikan	1	Laporan	180.000.000	
3.1.4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	1	Dokumen	1.000.000.000	
3.1.5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah kasus TPTGR yang ditangani Jumlah Kasus TPTGR yang ditangani Jumlah Tanah yang disertifikatkan	2 2 19	Kasus Kasus Bidang Tanah	1.155.502.700	
3.1.6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beralih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran Jumlah lahan (Tanah PT.KAI) Tersedia	58 1	Unit Lokasi	1.635.452.500	
3.1.7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD	37	Laporan	280.000.000	
3.1.8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di Update	1	aplikasi	160.000.000	
3.1.9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	70	Orang	161.982.500	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				12.583.867.929	
4.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12.583.867.929	
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola Jumlah SPPT yang didistribusikan	3 465	Aplikasi SPPT	689.402.800	
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Aplikasi Yang di Update Jumlah Aplikasi Yang di Update	1 1	aplikasi Aplikasi	2.020.000.000	
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pembinaan Terhadap Wajib Pajak	150	Wajib pajak	240.000.000	
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran	50 12	Unit Kali	1.088.000.000	
4.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan PBB P2 dan jumlah printonix Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang dihasilkan	6 1	Aplikasi, printonix Dokumen	451.000.000	
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2 Jumlah Objek Pajak	20000 10	Objek Pajak Objek Pajak	3.160.000.000	
4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan	486	Dokumen	400.000.000	
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Yang Ternilai	25	Objek pajak	300.000.000	
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	5000	Objek Pajak	425.000.000	
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Hotel dan restoran Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	483 500	Objek Pajak Objek Pajak	1.123.549.000	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN Anggaran (Rp.)	Ket.
		Indikator	Target	Satuan		
4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Hasil Penagihan Pajak Daerah Jumlah laporan data PBB-P2 Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa	7300 12 93	Dokumen Laporan Laporan	832.291.000	
4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak Jumlah reklame yang ditertibkan	345 50	Dokumen Reklame	897.000.000	
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa	60	Wajib Pajak	315.000.000	
4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB P2 Jumlah Wajib Pajak peserta Sosialisasi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Jumlah Desa yang lunas dalam Pembayaran Pajak PBB-P2 dalam masa pajak	93 150 93	Laporan Wajib Pajak Desa	642.625.129	
Jumlah					405.903.129.190	

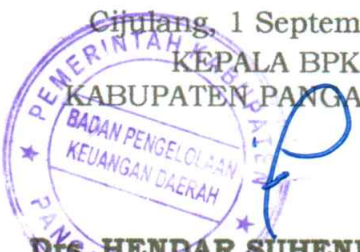


BAB III PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Cijulang, 1 September 2020
KEPALA BPKD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641116 199303 1 007